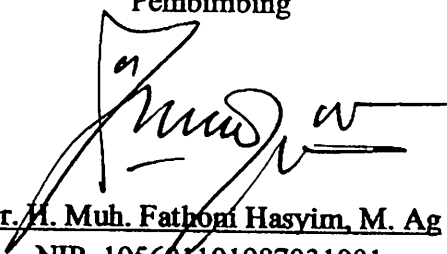


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nafid Aris Sanikh ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juli 2010

Pembimbing



Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M. Ag
NIP. 195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nafid Aris Sanikh ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah

Majelis Munaqosah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M. Ag
NIP: 195601101987031001

Arif Wijaya, SH, M. Hum
NIP: 1971071920050110

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,

Dr. H. Sahid HM, M. Ag
NIP:196803091996031002

Kemal Reza, S. Ag, M. Ag
NIP: 197507012005011008

Dr.H.Muh.Fathoni Hasyim,M.Ag
NIP: 195601101987031001

Surabaya, 26 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faisal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Teknologi di zaman sekarang ini semakin canggih seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Misalnya teknologi video rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) yang berfungsi sebagai alat pemantau keadaan yang di dalamnya terdapat alat perekam DVR (*Digital Video Recorder*). Kehadiran rekaman video CCTV sangat bermanfaat sebagai sumber keterangan jika telah terjadi kejahatan tindak pidana. Namun keberadaan rekaman video CCTV tidak termasuk ketentuan alat bukti di dalam KUHAP. Keberadaan rekaman video CCTV juga tidak terdapat di dalam ketentuan Hukum Islam. Sehingga bagaimana keakuratan dan validitas rekaman video CCTV dalam kasus pidana. Serta bagaimana kedudukan dan kekuatan rekaman video CCTV menurut KUHAP dan Hukum Islam. Semua itu masih belum pasti dari sisi hukum pembuktiannya.

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pola pikir deduktif dan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini tetap mengacu pada KUHAP dan Hukum Islam sebagai sumber primernya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keakuratan rekaman video CCTV sangat membantu dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagai langkah untuk menetapkan seorang tersangka. Validitas rekaman video CCTV membantu untuk menguatkan hakim dalam proses pembuktian di pengadilan. Validitas rekaman video CCTV hanya bisa diketahui oleh ahli IT (*Information Technology*) forensik. Kedudukan dan kekuatan rekaman video CCTV menurut KUHAP bisa sebagai alat bukti petunjuk. Hakim akan menyimpulkan keterangan-keterangan dari saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian, beserta juga hasil laporan dari keterangan ahli yang tentunya akan menambah keyakinan hakim sebelum memutus perkara. Kedudukan dan kekuatan rekaman video CCTV menurut Hukum Islam bisa sebagai alat bukti *Qarīnah*. *Qarīnah* dalam Islam disebut sebagai petunjuk atau tanda-tanda yang bisa mengarahkan ke jalan kebenaran. *Qāḍī* akan mencermati bukti/tanda-tanda tersebut sebelum memutus perkara, kemudian akan menyimpulkannya sesuai dengan keyakinannya.

Setiap ruangan yang membutuhkan pengawasan ekstra lebih baik menggunakan kamera video CCTV. Keberadaan rekaman video CCTV bisa menjadi bukti yang menguatkan hakim dalam proses pembuktian di dalam persidangan. Sehingga kamera video CCTV bisa mencegah dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kepada para praktisi hukum maupun para legislator untuk merumuskan KUHAP yang baru dengan memasukkan rekaman video CCTV sebagai alat bukti yang sah. Hal ini guna menutup celah hukum yang masih kosong demi tegaknya keadilan hukum di Negara Republik Indonesia.

I. Metode Penelitian.....	17
J. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : ALAT BUKTI DALAM KUHAP DAN HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Fungsi Alat Bukti.....	22
B. Sistem Hukum Pembuktian.....	27
C. Macam Alat Bukti Dalam KUHAP	30
D. Macam Alat Bukti Dalam Hukum Islam	40
BAB III : PEMBUKTIAN REKAMAN VIDEO CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>)	
A. Pengertian Kamera Video CCTV	56
B. Keakuratan dan Validitas Pembuktian Rekaman Video CCTV	60
C. Proses Pembuktian Rekaman Video CCTV di Pengadilan.....	66
D. Kedudukan dan Kekuatan Alat Bukti Rekaman Video CCTV	
Dalam Pembuktian	71
BAB IV : ANALISIS TERHADAP ALAT BUKTI REKAMAN VIDEO CCTV	
(<i>Closed Circuit Television</i>) DALAM UPAYA PEMBUKTIAN	
A. Keakuratan dan Validitas Alat Bukti Rekaman Video CCTV	
Dalam Kasus Pidana.....	78
B. Kedudukan dan Kekuatan Alat Bukti Rekaman Video	
CCTV Menurut KUHAP dan Hukum Islam	82
1. Kedudukan dan kekuatan alat bukti rekaman video CCTV	
menurut KUHAP.....	82

2. Kedudukan dan kekuatan alat bukti rekaman video

CCTV menurut Hukum Islam	87
--------------------------------	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	91
---------------------	----

B. Saran.....	92
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA	93
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

5. Keterangan Terdakwa²

Sedangkan dalam kajian Hukum Islam, mengenai macam alat bukti terdapat perbedaan pendapat dari para ulama', diantaranya ada yang menyebut alat bukti terdiri atas:

1. *Iqrār* (pengakuan)
2. *Syahādah* (kesaksian)
3. *Yamīn* (sumpah)
4. *Nukūl* (menolak sumpah)
5. *Qasāmah* (bersumpah 50 orang)
6. *‘Ilmul Qāḍī* (pengetahuan hakim)
7. *Qarīnah* (petunjuk/sangkaan) yang meyakinkan³

Tegaknya hukum dalam suatu proses peradilan hukum pidana bisa dilihat dari bagian dari proses pembuktiannya. Benar atau salahnya suatu permasalahan perlu dibuktikan terlebih dahulu. Begitu pentingnya suatu pembuktian ini, membuat setiap orang tidak diperbolehkan untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian. Pembuktian merupakan titik sentral dalam proses pemeriksaan perkara pidana

² R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana* (Bogor: POLITEIA, 1997), 162

³Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Putra, Cet. I, 1997), 136

dalam persidangan di pengadilan, dalam rangka menemukan kebenaran materiil tentang suatu peristiwa pidana itu.

Di dalam Q.S. 49 al-Hujurat: 6 telah dijelaskan pentingnya untuk mencari kebenaran atas suatu bukti yang ada.

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِثْلِهِ ۖ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا

فَعَلَّمْتُمْ نَادِي مِيقَاتِ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.⁴

Adapun pengetahuan hakim tentang hukum Allah, yaitu bahwa hakim tersebut harus memiliki pengetahuan tentang Naş-Naş yang Qaṭ'i atau hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama' dan jika tidak terdapat pula hukum yang disepakati oleh ulama', maka ditempuhlah dengan jalan ijtihad dan jalan ijtihad inipun didasarkan pada persangkaan yang kuat.⁵

Di dalam alat bukti yang ada di hukum Islam, tidak ada yang menyatakan rekaman video CCTV (*Closed Circuit Television*) sebagai alat bukti. Alat bukti dalam hukum Islam yang paling sering digunakan yaitu persaksian. Persaksian yang dilakukan oleh seorang maupun beberapa orang dalam kasus tindak pidana.

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001), 846

⁵ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa: Imron AM (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 106

pada sarana Elektronik yang dipakainya. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang bentuk kejahatannya lebih terpaku dengan apa yang terdapat di dalam KUHP. Maka dari itu, dilihat dari jenis tindak kejahatannya alat bukti yang digunakan tetap harus mengarah apa yang sudah ada di dalam KUHP. Meskipun terdapat bukti Informai/Dokumen Elektronik yang menguatkan, namun harus dibenarkan dan kuatkan dengan alat bukti lain yang sesuai dengan KUHP.

Di berbagai kasus tindak pidana di Indonesia, bukti rekaman video CCTV sudah banyak digunakan sebagai sarana untuk menguatkan pembuktian hukum. Misalnya contoh kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Antasari Azhar. Penyidik polisi menjadikan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Rekaman pertemuan antara Antasari Azhar dan Komisaris Besar Williardi Wizar di rumah Sigid Haryo Wibisono itu saat ini masih ditelusuri ahli dari luar kepolisian. *"Ada, (rekaman) itu bisa dibaca kok,"* kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi, M Iriawan, di Polda Metro Jaya. Iriawan menjelaskan, hasil rekaman CCTV itu masih diperiksa ahli yang berasal dari luar kepolisian. Iriawan mengaku sengaja mendatangkan ahli tersebut karena polisi sulit untuk membuka rekaman itu dan dikarenakan agar alat perekam itu tidak rusak. Menurutnya, dalam minggu ini rekaman CCTV itu sudah bisa diketahui. *"Dan jika berkaitan dalam kasus ini, maka bisa dijadikan sebagai alat*

Dari keterangan kasus di atas jelas bahwa petugas menggunakan hasil rekaman video CCTV untuk mengetahui siapa pelakunya. Karena seorang penegak hukum pasti berhati-hati sebelum menangkap seorang yang dicurigai bersalah. Dalam memberikan kekuatan proses penyelidikan dan penyidikan, petugas akan menggunakan CCTV sebagai sarannya. Demikian juga dalam hal persidang di Pengadilan, karena dari hasil rekaman video CCTV tersebut dengan jelas dapat diketahui siapa pelaku serta aksi pelaku dalam kejahatannya. Meskipun masih perlu diketahui keaslian dan validitas dari hasil rekaman video CCTV.

Maka dari itu keberadaan rekaman video CCTV sebagai alat bukti dalam kasus pidana di zaman sekarang ini sangat penting untuk dikaji. Hal ini dikarenakan kecanggihan teknologi selalu ikut berperan dalam setiap aktivitas kerja manusia. Dalam pembuktian kasus tindak pidana di Pengadilan, rekaman video CCTV selalu menjadi alat untuk memberikan keterangan-keterangan yang berupa peristiwa dari tindak pidana tersebut. Sementara itu keberadaan rekaman video CCTV tidak terdapat di dalam KUHP pasal 184 mengenai macam-macam alat bukti. Hal ini menjadi sebuah keprihatinan akademis karena belum ada ketentuan yang mengatur rekaman video CCTV sebagai alat bukti dalam hal pembuktian tindak pidana konvensional. Dengan demikian haruslah dicari sebuah solusi mengenai keberadaan sisi hukum rekaman video CCTV sebagai

alat bukti tanpa mengesampingkan alat-alat bukti yang sudah tercantum dalam KUHAP.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa identifikasi masalah yang terkandung di dalam pembahasan karya ilmiah ini. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Proses penyelesaian kasus pidana dalam hukum informasi teknologi dengan bukti rekaman video CCTV.
2. Keakuratan dan validitas rekaman video CCTV dalam kasus pidana.
3. Kedudukan dan kekuatan rekaman video CCTV menurut KUHP.
4. Rekaman video CCTV menurut perspektif UU No.11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).
5. Perbandingan kekuatan alat bukti dalam pasal 184 KUHP dengan bukti rekaman video CCTV.
6. Perbandingan kekuatan alat bukti dalam Hukum Islam dengan bukti rekaman video CCTV.
7. Kedudukan dan kekuatan rekaman video CCTV menurut hukum Islam.

C. Batasan Masalah

Karena luasnya permasalahan, maka ditetapkan batasan masalah yang perlu untuk dikaji. Studi ini dibatasi pada masalah keakuratan dan validitas alat bukti rekaman video CCTV dalam kasus pidana. Demikian juga masalah kedudukan dan kekuatan alat bukti rekaman video CCTV menurut KUHAP dan Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa pokok permasalahan yang dipandang relevan untuk dikaji dan dibahas. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Bagaimana keakuratan dan validitas alat bukti rekaman video CCTV dalam kasus pidana ?
2. Bagaimana kedudukan dan kekuatan alat bukti rekaman video CCTV menurut KUHAP dan Hukum Islam ?

E. Tujuan Studi

Adapun tujuan dari penelitian yang kami lakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui keakuratan dan validitas alat bukti rekaman video CCTV dalam kasus pidana.

2. Untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan alat bukti rekaman video CCTV menurut KUHAP dan Hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil studi ini diharapkan bisa membawa manfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal sebagai berikut:

1. Sebagai bahan yang bisa menjawab permasalahan hukum yang terkait dengan pembuktian rekaman video CCTV menurut KUHAP dan Hukum Islam.
2. Sebagai bentuk persembahan disiplin keilmuan mengenai keakuratan dan validitas alat bukti rekaman video CCTV dalam kasus pidana, kedudukan dan kekuatan alat bukti rekaman video CCTV menurut KUHAP dan Hukum Islam bagi pembaca pada umumnya, atau sebagai persembahan khazanah keilmuan dalam bidang hukum.

G. Definisi Operasional

1. Kamera video CCTV (*Closed Circuit Television*), yang dimaksudkan adalah:
CCTV (*Closed Circuit Television*) atau dalam bahasa Indonesianya
yaitu Televisi dengan Sirkuit Tertutup adalah perangkat peralatan pengawas

a. Sumber Data Primer

Adapun data primer yang akan digunakan meliputi beberapa buku.

Buku-buku primer yang digunakan antara lain:

- 1). KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- 2). Peradilan Dan Hukum Acara Islam oleh Hasbi Ash Shiddieqi dan lain-lain

b. Sumber Data Sekunder

Adapun data-data sekunder yang akan digunakan meliputi beberapa buku. Buku-buku sekunder yang digunakan antara lain:

- 1) Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum oleh H. M. A Kuffal
- 2) Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif
- 3) *Assessing CCTV As An Effective Safety And Management Tool For Crime Solving, Prevention And Reduction* oleh Vivien Carli dan lain-lain

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan atau studi dokumentasi, yaitu dengan cara mencari dan menghimpun data.¹⁵ Dalam hal ini yaitu berupa buku-buku dan kitab-kitab

¹⁵ Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. II, 1985), 53

yang membahas tentang macam-macam alat bukti dan keterangan yang ada kaitannya dengan rekaman video CCTV sebagai bukti dalam kasus pidana.

4. Teknik Mengolah Data

Dalam mengolah dan menganalisis data tentang keakuratan, validitas serta kedudukan dan kekuatan alat bukti rekaman video CCTV, penulis akan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah suatu cara untuk menemukan kembali data-data yang sudah dikumpulkan. Serta meninjau kembali data-data yang sudah ada untuk diketahui dengan pasti kejelasannya.
- b. *Organizing Data*, yaitu menyusun, mensistematika data-data yang sudah diperoleh ke dalam kerangka pembahasan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. *Penemuan Hasil Riset*, yaitu dengan melakukan analisis lanjutan secara kualitatif terhadap hasil *Organizing Data* dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil dan pendapat.

5. Teknik Analisis Data

- a. Pola pikir Deduktif dengan metode analisis Deskriptif, yaitu menganalisis data dengan bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian melihat fakta-fakta yang bersifat khusus dengan melalui penggambaran secara sistematis terhadap fakta tertentu atau bidang tertentu secara faktual. Dalam hal ini menyangkut tentang masalah

pembuktian dalam tindak pidana serta akan diterangkan mengenai macam alat bukti yang telah ditentukan oleh KUHAP dan Hukum Islam. Alat bukti yang berupa rekaman video CCTV akan di analisis sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta dalam kajian Hukum Islam sebagai sarana pembuktian dalam proses peradilan pidana.

J. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang merupakan langkah-langkah penelitian yang berisi tentang latar latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan dasar-dasar penelitian yang membahas mengenai alat bukti dalam KUHAP dan Hukum Islam, dengan pokok bahasan tentang pengertian dan fungsi alat bukti, sistem hukum pembuktian, serta macam alat bukti dalam KUHAP dan Hukum Islam.

Bab III merupakan fakta atau data penelitian yang membahas mengenai pembuktian rekaman video CCTV (*Closed Circuit Television*), dengan pokok bahasan tentang pengertian kamera video CCTV, keakuratan dan validitas pembuktian rekaman video CCTV, proses pembuktian rekaman video CCTV di

BAB II

ALAT BUKTI DALAM KUHPAP DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Fungsi Alat Bukti

Pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹

DR. Hamzah memberikan batasan mengenai istilah alat bukti yang dikutip oleh Bambang Waluyo, yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil atau dakwaan. Kemudian alat bukti adalah upaya pembuktian melalui dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan sidang pengadilan misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, yang dalam perkara perdata termasuk juga persangkaan dan sumpah.²

Menurut Ibnu Qoyyim al Jāuziyyah alat bukti adalah bukti yang diajukan di depan pengadilan untuk menguatkan gugatan. Untuk memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan para pihak yang

¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, Cet. I, 2003), 11

² Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 1996), 23

Maka bisa disimpulkan pengertian alat bukti yaitu suatu hal yang berupa barang atau non barang yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang mana hal itu digunakan untuk memperkuat dakwaan/tuntutan/gugatan ataupun dalam menolak tuntutan maupun gugatan.

Dalam perkara pidana selain alat bukti juga ada istilah barang bukti. Barang bukti berfungsi untuk menambah keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Sehubungan dengan itu, maka barang bukti tersebut haruslah diusahakan oleh penyelidik agar proses penyelesaian perkara bisa berjalan dengan lancar.

HIR (*Herziene Inlands Reglement*) adalah sumber ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku di wilayah Jawa, bahwasanya di dalam HIR (*Herziene Inlands Reglement*) pengertian barang bukti hanya berupa barang-barang bergerak saja. Mengenai pengertian barang bergerak, sebagaimana pasal 509 KUHPerdata bahwa karena sifatnya, benda yang dapat dipindahkan yaitu antara

³ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa: Imron AM (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 107

⁴ *Ibid.*, 125

Dengan melihat beberapa pendapat di atas, maka bisa diambil pengertian mengenai barang bukti. Barang bukti adalah barang-barang yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan mempunyai fungsi untuk diperlihatkan kepada terdakwa atau saksi di persidangan guna memperkuat keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.⁶ Terdapat pengertian yang berbeda antara alat bukti dan barang bukti, meskipun secara istilah mempunyai bahasa yang hampir sama, namun secara garis besar alat bukti masih bersifat abstrak dan berwujud benda sedangkan barang bukti bersifat konkret dan dipastikan benda yang bisa diindera.

Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

⁵ Rosita, *Hukum Pembuktian*, 60

⁶ Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, Cet. I, 1988), 148

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".⁷

setidaknya ada aturan-aturan yang menjadi acuan hakim dalam mengambil putusan untuk memenjarakan terdakwa atau tidak.⁸

Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam hukum pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti. Semua hal tersebut menjadi kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

- Undang-undang
- Doktrin atau ajaran
- Yurisprudensi⁹

Karena hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 78 dan Penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Apabila di dalam praktek menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan, maka dipergunakan doktrin atau yurisprudensi.¹⁰

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2008), 38

⁹ Rosita, *Hukum Pembuktian*, 10

¹⁰ *Ibid.*, 10

Undang namun hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti di luar yang ditentukan oleh Undang-Undang.¹²

Di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang tersangka haruslah didasarkan pada alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reason*), karena putusan tersebut juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Sistem pembuktian ini dikenal dengan sistem pembuktian bebas.

3. *Positif Wetelijk* (Pembuktian berdasar Undang-Undang)

Sistem pembuktian positif (*positief wetelijk*) adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.¹³

Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah. Alat bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan. Pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah yakni yang ditentukan oleh Undang-Undang maka terdakwa bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.¹⁴

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam artian keterangan saksi tidak berlaku apabila diperoleh dari orang lain (*testimony de auditu*). Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan. Dengan maksud hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah.

Dalam hukum acara pidana dikenal adanya saksi-saksi yang memberatkan terdakwa (*saksi a charge*) dan saksi-saksi yang meringankan terdakwa (*saksi a de charge*). Kedudukan sebagai saksi merupakan kewajiban bagi setiap orang. Karena itu saksi yang dipanggil oleh penyidik/penuntut umum atau pengadilan wajib untuk memenuhi panggilan, jika menolak untuk memenuhi panggilan/memberikan keterangan maka dapat dituntut dan diancam pidana berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku.¹⁸

Keterangan saksi bisa menjadi kekuatan alat bukti yang sah jika diucapkan di dalam persidangan dengan disumpah terlebih dahulu. Di dalam KUHAP pasal 187 ayat 7 diterangkan bahwa saksi yang tidak disumpah meskipun bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain bukan merupakan alat bukti yang sah namun hanya sebagai tambahan keterangan saja. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada

¹⁸ Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 1997), 141

pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan diminta untuk memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu dihadapan hakim.²² Seorang ahli dalam hal ini memberikan keterangan yang berupa kesimpulan pengetahuannya tentang masalah yang bersangkutan. Sehingga dapat memberikan keyakinan pada hakim atas putusan yang akan dibuatnya. Apakah seorang terdakwa tersebut layak atas hukuman yang diberikan atau justru sebaliknya. Hakim tidak mungkin menguasai semua perkara yang disidangkan, dengan demikian hakim harus mengetahui segala sesuatu dengan jelas dan semua faktor sebab dan akibatnya permasalahan tersebut.

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijkracht*) yaitu didalamnya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan.²³ Hakim mempunyai kebebasan dalam penilaian pembuktian dengan beberapa beban yang ditanggungnya antara lain tanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

²² Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek*, 149

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2000), 278

3. Alat Bukti Surat

Yang dimaksud dengan alat bukti surat ialah surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri yang disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.²⁴

²⁴ Rosita, *Hukum Pembuktian*, 62

- a. Dari segi Formal
- b. Dari segi Materiil²⁶

²⁵ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1992), 153

4. Petunjuk

Alat bukti berupa petunjuk diterangkan dalam KUHAP pasal 188 ayat 1 dan 2 sebagai berikut

- a. Petunjuk adalah sesuatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuainya, baik antara satu dengan lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat.²⁷

Jika ditinjau dari KUHAP pasal 188 ayat 2 bahwa alat bukti petunjuk didapat atau berasal dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, maka petunjuk akan dapat dihasilkan dari beberapa alat bukti tersebut, kemudian diolah sesuai dengan perbuatan, kejadian atau keadaan yang dicari dan diwujudkan.

Alat bukti petunjuk berbeda seperti alat bukti yang lainnya, yaitu mempunyai kriteria dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Petunjuk sebagai alat bukti dalam KUHAP pasal 184 diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lainnya belum dianggap hakim cukup membuktikan

²⁷ Rosita, *Hukum Pembuktian*, 17

Karena adanya syarat yang satu dengan yang lain harus terdapat persesuaian, maka dengan demikian berakibat bahwa sekurang-kurangnya perlu ada 2 (dua) petunjuk untuk memperoleh bukti yang sah atau sebuah alat bukti petunjuk dengan satu buah bukti lain yang ada persesuaian dalam keseluruhan pembuktian yang dapat menimbulkan keyakinan hakim.

5. Keterangan Terdakwa

Di dalam KUHAP pasal 189 dijelaskan pengertian alat bukti keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ketahui sendiri atau yang dialami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa.³⁰ Sedangkan istilah “keterangan terdakwa” mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan kata “pengakuan”. Karena keterangan terdakwa dapat berisi pengakuan atas sangkaan/dakwaan, akan tetapi dapat juga berisi pengingkaran/pemungkiran atas sangkaan/dakwaan atas diri terdakwa disertai dengan penjelasan yang berkaitan dengan pemungkiran tersebut.

³⁰ *Ibid.*, 167

D. MACAM ALAT BUKTI MENURUT HUKUM ISLAM

1. *Iqrār* (pengakuan)
2. *Syahādah* (kesaksian)
3. *Yamīn* (sumpah)

³¹ H. M. A. Kuffal, *Penerapan KUHAP*, 26

kejadian di antara anak-anak di tempat-tempat mereka belajar atau tempat mereka bekerja.³⁸

Hakim bisa menolak pernyataan dari saksi yang dirasa keterangannya tidak benar. Hakim harus tidak ragu-ragu jika menerima pernyataan dari saksi yang dirasa keterangannya benar. Namun hakim berkewajiban untuk mendengarkan keterangan dari saksi tanpa terkecuali. Karna dengan proses pembuktian dengan saksi ini merupakan langkah untuk mencari kebenaran.

Selain keharusan berbilang saksi juga diharuskan saksi itu orang yang adil. Karena tidak akan diterima kesaksian orang yang terkenal berdusta, buruk perangai dan keadaan. Juga tidak diterima kesaksiannya apabila antara saksi dan pihak terdakwa ada permusuhan keduniaan atau ada hubungan kekerabatan, perkongsian dan sebagainya. Bahkan sebagian mazhab mengharuskan hakim meneliti benar-benar tentang keadaan saksi.³⁹

Berita yang disampaikan secara *mutāwatir* menurut *fuqahā* adalah alat bukti yang paling nyata lebih kuat dari pada dua saksi. Maka perlu diingat bahwa berita *mutawair* memperoleh kedudukan yang demikian

³⁸ Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, 125

³⁹ Shiddieqi, *Peradilan Dan Hukum*, 146

telah bersumpah, maka selesailah persengketaan antara penggugat dan tergugat tentang perkara yang dipersengketakan. Maka sejak itu dan semua yang akan datang, menurut pendapat yang kuat, karena pembuktian sudah tidak berhasil dan jika tergugat menolak sumpah, maka dijatuhkan putusan atas kemenangan penggugat.⁴¹

Sumpah sebagai suatu jalan untuk menetapkan hukum merupakan jalan yang sudah paling tua di dunia. Dengan bersumpah akan memperingatkan telah berjanji kepada Allah yang menyuruhnya berlaku benar. Maka pada dasarnya sumpah merupakan bukti yang paling kuat, karena yang bersumpah akan terus mengingat dosa-dosa yang akan dibebankannya nanti.

4. *Nukūl* (penolakan sumpah)

Alat bukti *nukūl* dikenal dalam hukum Islam adalah penolakan sumpah yang berarti pengakuan, maka ia merupakan alat bukti yang terbatas juga dan penggugat harus memperkuat lagi gugatannya dengan bukti lain agar gugatannya dapat mengena kepada pihak lain (selain pihak yang menolak sumpah).⁴²

⁴¹ Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, 129

⁴² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian*, 95

Tentang penolakan sumpah sebagai alat bukti ini diperselisihkan oleh kalangan *fuqahā*, sebagaimana diuraikan oleh Salam Madkur.⁴³

- a. Mazhab Hanafi menganggap menolak sumpah adalah merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan sebagai dasar putusan dan ini juga pendapat dari Usman bin 'Affan dan *Qādī* Syuraih. Ada riwayat yang menyatakan, bahwa Abdullah bin Umar telah menjual seorang hamba seharga 800 dirham dalam keadaan sehat, kemudian pembelinya memperkarakan penjualnya kepada Usman bin 'Affan, lalu Usman berkata kepada penjual (Abdullah bin Umar), "*Bersumpahlah, bahwa kamu telah menjualnya sedang hamba sahaya itu dalam keadaan sehat*", kemudian Abdullah menolak untuk bersumpah, maka dikembalikanlah hamba sahaya tersebut kepada penjualnya oleh Umar.
- b. Mazhab Imam Syafi'i dan Maliki menyatakan, bahwa penolakan sumpah tidak dipakai sebagi alat bukti, tetapi jika tergugat menolak gugatan penggugat, maka pengugatlah yang disumpah, kemudian jika mau bersumpah maka putuslah atas dasar sumpah penggugat dan jika ia menolak sumpah maka ia dikalahkan.

⁴³ Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, 70

Dari kalangan ulama' yang menentang pendapat yang menyatakan bolehnya menggunakan '*ilmu qāḍī*' sebagai alat bukti, membawakan apa yang diriwayatkan Ad Dahhaq bahwa Umar bin Khaṭab pernah memeriksa perkara, di mana pihak-pihak yang bersengketa itu telah diketahui duduk persoalan mereka. Kemudian Umar berkata kepada pihak penggugat, "*Jika aku suka maka aku akan bertindak sebagai saksi dan akau tidak bertindak sebagai hakim, atau sebaliknya*". Ada juga riwayat yang sah dari As Sya'abi,

⁴⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian*, 123

Banyak contoh yang menunjukkan bahwa Islam menganggap *Qarīnah* sebagai alat bukti, dan bahwa Rasulullah saw menganggap dan menggunakan *Qarīnah* sebagai dasar putusannya. Serta disebutkan lagi bahwa Rasulullah saw pernah menahan orang dan menghukum tertuduh setelah timbul persangkaan karena tampak tanda-tanda mencurigakan pada diri tertuduh, dan Nabi pernah memerintahkan orang yang menemukan sesuatu agar menyerahkan barang temuannya kepada orang yang ternyata tepat dalam menyebutkan sifat-sifat barangnya yang hilang.

Menurut Mazhab Maliki, *Qarīnah* dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam segala persoalan baik itu merupakan darah, harta benda, had dan lain-lain. Mereka berpedoman pada apa yang telah ditegaskan oleh sahabat Umar bahwa hamilnya seorang perempuan yang tidak bersuami dan bukan pula hamba sahaya cukup sebagai bukti untuk memutuskan hukuman had.⁵¹

Keharusan bagi para ulama' untuk selalu menggali ijtihad jika terdapat sesuatu hal yang baru, khususnya yang terkait dengan masalah alat bukti di ungkapkan oleh Ibnu Qayyim yang dikutip oleh Muhammad Salam Madkur, yaitu:

“Inilah segi yang dilalaikan orang sehingga mereka meninggalkan hukuman had dan menyia-nyiakan hak-hak serta membuat penyelewengan-penyelewengan semakin berani menimbulkan kerusakan, dan mereka menjadikan syari’at Islam semakin sempit ruang lingkupnya, dan menutup diri mereka dari jalan-jalan yang benar mengungkap kebenaran dan

⁵¹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian*, 89

melaksanakannya dan dilain pihak ada orang-orang yang melampaui batas, sehingga berakibat keluar dari garis yang telah ditentukan hukumnya oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Padahal Allah SWT mengutus utusan-utusan-Nya dan menurunkan Kitab-Kitab adalah agar manusia bertindak adil, maka apabila telah tampak oleh-Nya, sedang Allah SWT telah menjelaskan di dalam syari'at yang diturunkan-Nya tentang jalan-jalan yang dimaksudkan demi tegaknya keadilan di tengah-tengah kehidupan manusia, maka jalan apapun yang sekiranya dapat menegakkan keadilan maka itu berarti dari agama".⁵²

Dalam menyelesaikan suatu perkara dan penyelesaian tersebut haruslah memenuhi tuntutan keadilan, maka hakim harus mengenal hukum di samping peristiwanya. Artinya Hakim harus mengetahui hukum-hukum Allah atau Undang-Undang yang berlaku dan cara penerapan terhadap kasus yang ditanganinya. Setelah itu mengetahui duduk perkaranya, agar dapat menjatuhkan vonis benar dan adil. Hakim haruslah mempunyai pengetahuan tentang Naş-Naş yang Qaṭ'i atau hukum-hukum yang telah disepakati ulama', dan jika ditemukan maka ditempuhlah jalan ijtihad yang didasarkan pada persangkaan yang kuat. Imam Malik dan sebagian *fuqahā* tidak membenarkan gugatan yang tidak nampak adanya kebenaran dan penggugatnya tidak diminta untuk bersumpah karena semata-mata melihat *Qarīnah* atau tanda-tanda secara lahiriyah.⁵³

⁵² Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, 119

⁵³ *Ibid*, 93

BAB III

PEMBUKTIAN REKAMAN VIDEO CCTV

(Closed Circuit Television)

A. Pengertian Kamera Video CCTV

Kamera video CCTV merupakan alat teknologi canggih yang banyak digunakan oleh manusia. Keberadaannya berfungsi sebagai sarana yang bermanfaat sebagai pemantau ruang atau keadaan yang sekiranya membutuhkan pengawasan ekstra.

Video surveillance is a technology system of surveillance by cameras, which can be set up and used by public authorities on public places for crime prevention and/or crime prosecution. It is a multifunctional technology, initially used to manage risk in cases of traffic jams, fire, accidents and crime.¹

“Video pengintai adalah sebuah sistem teknologi penjagaan dengan kamera, yang dapat diatur dan digunakan oleh otoritas publik pada tempat-tempat umum untuk pencegahan kejahatan dan/atau penuntutan kejahatan. Ini merupakan teknologi multifungsi, awalnya digunakan untuk mengendalikan resiko kemacetan lalu lintas, kebakaran, kecelakaan dan kejahatan”.

¹ Brandon C. Welsh and David P. Farrington, *Crime Prevention Effects of Closed Circuit Television: a Systematic Review* (London, 50 Queen Anne's Gate, 2002), 2

CCTV (*Closed Circuit Television*) merupakan teknologi video rekaman yang pertama kali dibuat oleh Walter Brunch yang diinstal di sebuah area peluncuran roket di Jerman pada tahun 1990. Dikarenakan peluncuran tersebut dirasa berbahaya, dan banyak orang yang ingin menyaksikannya, maka dibuatlah CCTV sehingga dapat digambarkan secara detail mengenai peluncurannya. Teknologi CCTV masih digunakan untuk melihat peluncuran roket, namun meluas fungsinya ke tempat yang membutuhkan pengamanan tinggi.³

³ Vivien Carli, *Assessing CCTV As an Effective Safety and Management Tool For Crime Solving, Prevention and Reduction* (London, 50 Queen Anne's Gate, 2002), 3

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan suatu keamanan, CCTV merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang bisa digunakan untuk memantau situasi dan kondisi di tempat tertentu, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Kamera video CCTV akan memberikan sinyal pada monitor dan setiap hasil rekaman peristiwa akan disimpan dengan alat tertentu dan dapat dibuka kembali jika ingin melihatnya. Pada umumnya kamera video CCTV seringkali digunakan untuk mengawasi tempat-tempat umum, perkantoran, rumah maupun untuk keperluan lain yang membutuhkan pengawasan ekstra.

DVR (*Digital Video Recorder*) adalah sebuah media penyimpanan hasil rekaman yang telah terpantau oleh kamera CCTV. Besar kecilnya kapasitas penyimpanan hasil rekaman tergantung pada *harddisk* yang terpasang (pada umumnya 160 *Gygabyte*, namun adapula yang diupgrade hingga 1 *Terabyte*). Hasil rekaman video tersebut ada yang berformat QCIF, MPEG-4 dan AVI. Dengan alat perekam ini memungkinkan kamera CCTV akan bisa diakses atau di monitor dari mana saja di seluruh dunia dengan menggunakan kabel telepon, internet dan *hand phone* yang sudah support dengan GPRS / 3G.⁴

⁴ <http://binksblogger.blogspot.com/2009/03/konsep-teknologi-cctv.html> (Kamis, 10 Juni 2009)

Keberadaan alat perekam DVR bisa menyimpan berbagai bentuk peristiwa, maupun aktivitas kerja orang-orang secara terus menerus. Dari keseluruhan isi rekaman yang tersimpan tersebut bisa dilihat kembali dan dianalisis dengan menggunakan sistem tertentu. Sehingga rekaman video CCTV sangat efektif sebagai sarana untuk mengetahui kejadian-kejadian yang telah terjadi. Terdapat banyak kecanggihan yang terdapat dari kamera video CCTV. Banyak jenis kamera CCTV yang telah banyak dikembangkan sebagai sarana yang menunjang dengan kebutuhan aktifitas kerja manusia.

There are many types of CCTV cameras, they can be categorized by the types of images they are able to capture, the amount of frames they can take per minute, the type of connection to the monitor or video recording device, whether they are able to move position, and special functions they can provide.⁵

“Ada banyak jenis kamera CCTV yang dapat dikategorikan dengan jenis gambar yang mampu untuk menangkap, jumlah frame yang dapat mengambil per menit, jenis koneksi ke monitor atau perangkat perekaman video, apakah mereka mampu berpindah posisi, dan yang dapat menyediakan fungsi khusus”.

Kamera video CCTV sudah mengalami kemajuan mulai dari bentuk fisik kamera yang lebih fleksibel sampai kualitas gambar yang terekam. Kecanggihan teknologi ini membawa pengaruh besar terhadap tingkat pengawasan serta memberi kemudahan bagi aktifitas kerja manusia. Semua

⁵ Martin Gill Angela and Spriggs, *Assessing the Impact of CCTV* (London: 50 Queen Anne's Gate, 2005), 9

4. *Cellular Alarm Communications*, merupakan teknologi yang telah mengembangkan perangkat lunak (*facet*) untuk menghubungkan kamera video CCTV dengan telepon seluler. Perangkat lunak ini menggunakan teknologi *Bluetooth* yang menghubungkan ponsel bersama menjadi sebuah jaringan. Informasi dibagi antara telepon selular dan peristiwa yang diambil secara kolektif dan dikirimkan ke komputer melalui sebuah sel standar koneksi telepon untuk analisa lebih lanjut.

Namun dari segi keakuratan yang ada dalam fungsi kamera video CCTV, di dalam persidangan, hakim tidak serta merta untuk meyakini begitu saja isi yang ada pada rekaman video CCTV. Dibutuhkan cara lain untuk diketahui validitas/keaslian dari isi rekaman video CCTV tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena CCTV merupakan sebuah dokumen elektronik yang keberadaannya bisa dipengaruhi oleh orang lain. Sehingga besar kemungkinan juga isi dari rekaman video CCTV tersebut menjadi tidak bisa dibaca ataupun hanya sebuah rekayasa belaka.

2. Penyimpanan bukti digital (*Preserving Digital Evidence*). Bentuk, isi, makna bukti digital hendaknya disimpan dalam tempat yang steril. Untuk benar-benar memastikan tidak ada perubahan-perubahan, hal ini vital untuk diperhatikan. Karena sedikit perubahan saja dalam bukti digital akan merubah juga hasil penyelidikan. Bukti digital secara alami bersifat sementara (*volatile*), sehingga keberadaannya jika tidak teliti akan sangat mudah sekali rusak, hilang, berubah, mengalami kecelakaan.
3. Analisa bukti digital (*Analizing Digital Evidence*). Barang bukti setelah disimpan, perlu diproses ulang sebelum diserahkan pada pihak yang membutuhkan. Pada proses inilah skema yang diperlukan akan fleksibel sesuai dengan kasus-kasus yang dihadapi. Barang bukti yang telah didapatkan perlu diexplore kembali beberapa poin yang berhubungan dengan tindak pengusutan, antara lain: (a) Siapa yang telah melakukan. (b) Apa yang telah dilakukan (Ex. Penggunaan software apa), (c) Hasil proses apa yang dihasilkan. (d) Waktu melakukan. Setiap bukti yang ditemukan, hendaknya kemudian dilist bukti-bukti potensial apa sajakah yang dapat didokumentasikan.
4. Presentasi bukti digital (*Presentation of Digital Evidence*). Kesimpulan akan didapatkan ketika semua tahapan tadi telah dilalui, terlepas dari ukuran obyektifitas yang didapatkan, atau standar kebenaran yang diperoleh, minimal bahan-bahan inilah nanti yang akan dijadikan “modal” untuk ke

pengadilan. Proses digital dimana bukti digital akan dipersidangkan, diuji otentifikasi dan dikorelasikan dengan kasus yang ada. Pada tahapan ini menjadi penting, karena disinilah proses-proses yang telah dilakukan sebelumnya akan diurai kebenarannya serta dibuktikan kepada hakim untuk mengungkap data dan informasi kejadian.

Namun keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli hanya sebatas pada informasi yang terkait dengan bidang keahliannya. Laporan hanya tertuju pada hal-hal yang terkait dengan rekaman video CCTV tersebut, khususnya keterangan yang menunjukkan keaslian dan kejelasan isi dari rekaman video CCTV. Mengenai diterima atau tidaknya laporan keterangan dari ahli, hanya hakimlah yang bisa menentukannya sesuai dengan keyakinannya.

C. Proses Pembuktian Rekaman Video CCTV di Pengadilan

Sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif. Hakim dalam mengambil keputusan tentang benar atau salahnya seorang terdakwa tidak hanya mengacu pada alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku saja, namun juga atas pertimbangan keyakinan hakim yang sesuai dengan hati nuraninya. Dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan, terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam pemeriksaan perkara sebelum putusan dijatuhkan oleh hakim. Unsur-unsur tersebut adalah

Pada dasarnya keterangan dari ahli diperlukan jika masih terdapat kekurangan alat bukti dan dirasa belum cukup untuk menguatkan keyakinan hakim. Maka dari itu dalam proses pelaksanaannya, dilakukan setelah tidak ada lagi alat-alat bukti lain yang di ajukan oleh Jaksa. Terkait dengan bukti rekaman video CCTV (*Closed Circuit Television*), hakim meminta Jaksa untuk menghadirkan saksi ahli untuk menganalisis keaslian dan hal-hal apa saja yang bisa diketahui oleh saksi ahli. Hasil dari laporan saksi ahli mengenai keotentikan rekaman video CCTV yang nantinya akan disimpulkan sendiri oleh hakim sesuai dengan analisa dan keyakinannya. Karena alat bukti keterangan saksi ahli

¹⁵Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, Cet. II, 2005), 319, 407

bersifat bebas, artinya hakim bisa menerima atau menolaknya jika dirasa tidak sesuai dengan keyakinannya.¹⁶

A. Pitlo mengungkapkan bahwa alat-alat elektronik, karena Undang-Undang yang dipakai sekarang dibuat oleh para ahli hukum sejak seratus tahun yang lalu, mereka tidak memimpikan bahwa zaman semakin berkembang sehingga teknik modern telah menghasilkan alat-alat bukti baru seperti foto, file, piringan hitam, tape recorder, pengujian darah dan lain-lain.²³

Namun seiring perkembangan zaman telah muncul Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE). Di dalam isi Undang-Undang tersebut telah dinyatakan dengan jelas mengenai alat-alat bukti yang sah. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang ada di Indonesia. Di dalam Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1 telah dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.²⁴

²³ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1995), 30

²⁴ Ermanjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik* (Yogyakarta: Pustaka Timur, Cet. 1, 2010), 201

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁵

menjelaskannya secara mendetail siapa saja dan apa saja yang telah direkamnya. Hal ini sangatlah berguna untuk menjelaskan kepada pihak kepolisian jika telah terjadi tindak pidana. Keakuratan dari rekaman video CCTV membantu pihak yang berwajib untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana secara lebih cepat dan akurat.

Namun keakuratan dari rekaman video CCTV hanya sebatas alat teknologi yang besar kemungkinan bisa saja terjadi kesalahan dalam penafsirannya. Kecanggihan fungsi dari kamera video CCTV salah satunya yaitu digunakan untuk menterjemahkan wajah seseorang yang kemudian akan dicocokkan dengan data yang sudah ada. Kemungkinan untuk menterjemahkan wajah bisa akurat jika keadaan sekitar mendukungnya, seperti halnya kualitas kamera, posisi kamera, pencahayaan dan terhalang tidaknya wajah pelaku dengan obyek lain.

Sebagai alat teknologi modern, kamera video CCTV tentunya mempunyai kelemahan-kelemahan yang tanpa diprediksi sebelumnya. Dari segi keakuratannya, rekaman video CCTV sangatlah berguna dalam membantu pihak kepolisian untuk mencari pelaku tindak pidana yang akan dijadikan sebagai tersangka. Keakuratan dari rekaman video CCTV menjadi lebih sempurna jika dikuatkan dengan validitas dari isi rekaman video CCTV.

Validitas rekaman video CCTV bisa diketahui oleh orang yang ahli di bidang IT (*Information Technology*). Karena hanya orang-orang yang faham tentang IT yang bisa mengetahui seberapa besar prosentasi keaslian dari rekaman yang disimpan oleh kamera CCTV. Sebagai sebuah perangkat elektronik, tentunya kamera video CCTV hanya berupa alat perekam yang dibuat oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Dengan kemampuan pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang ahli, tidak menutup kemungkinan bahwa isi rekaman bisa berubah ataupun tidak bisa dibaca ketika dalam proses penyelidikan. Hal ini tentunya akan menyulitkan pihak kepolisian untuk menetapkan seorang pelaku sebagai tersangka.

Rekaman video CCTV sebagai alat bukti permulaan tentunya harus mempunyai keterangan yang pasti dari pihak penyelidik atau penyidik akan keasliannya. Validitas rekaman video CCTV hanya bisa diketahui oleh orang yang ahli IT forensik. Dengan menggunakan sistem komputer tertentu, nantinya akan bisa memastikan bahwa isi rekaman masih terjaga keasliannya. Validitas

rekaman video CCTV bisa dikatakan benar jika sesuai dengan prosedur kerja yang ada dalam IT forensik. Seperti halnya proses identifikasi, penyimpanan bukti digital, analisa bukti digital serta presentasi bukti digital. Jika prosedur tersebut telah dilakukan maka validitas rekaman video CCTV bisa diterima kebenarannya.

Kecanggihan kamera video CCTV yang mampu untuk menterjemahkan wajah seseorang dan juga validitas dari isi rekaman CCTV, akan menjadi sebuah petunjuk bagi penegak hukum dalam proses pembuktian di persidangan. Hal ini menjadi penting jika hanya ada bukti rekaman video CCTV yang menjadi sumber keterangan telah terjadi kejahatan tindak pidana.

Pihak penyelidik tentunya tidak akan sembarangan dalam menentukan pihak tersangka. Jika perkara sudah masuk di dalam pengadilan, hakim pun tidak serta merta untuk meyakini dari isi dari rekaman video CCTV, namun harus dibuktikan dulu validitasnya oleh saksi ahli IT forensik yang mempunyai lisensi atau sertifikasi seperti halnya Roy Suryo atau Ruby Alamsah untuk bisa lebih menguatkan keyakinan hakim.

hakim dan akan disimpulkan benar tidaknya terdakwa telah melakukan tindak pidana. Kekuatan rekaman video CCTV dalam upaya pembuktian sama halnya dengan kekuatan dari alat bukti petunjuk. Keterangan-keterangan dari saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian akan menguatkan keyakinan hakim dalam mengambil putusan. Alat bukti petunjuk merupakan pembuktian secara tidak langsung. Artinya hakim harus menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lain tentunya yang harus saling menguatkan.

Hakim sebelum memutuskan salah atau tidaknya pihak terdakwa harus bisa dibuktikan minimal dengan dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti tersebut nantinya yang akan menjadi dalil untuk menguatkan keyakinan hakim dalam menetapkan hukuman jika terdakwa bersalah. Juga akan menguatkan keyakinan hakim untuk menetapkan dalil-dalil yang mendasari putusannya jika terdakwa tidak bersalah. Hal ini menandakan kewajiban hakim untuk selalu cermat dan teliti dalam proses pembuktian di persidangan. Karena proses pembuktian merupakan suatu bagian terpenting dalam rangka mencari kebenaran materiil.

Keterkaitan dengan bukti rekaman video CCTV, hakim merasa perlu keterangan dari saksi ahli jika hakim tidak mengetahui perihal keilmuan teknologi CCTV. Keterangan saksi ahli ini yang akan menjelaskan

keakuratan dan validitas isi dari rekaman video CCTV. Juga apabila alat bukti yang diajukan Jaksa dirasa belum cukup dalam proses pembuktian. Maka keterangan dari ahli dibutuhkan ketika sudah tidak ada alat bukti lagi yang bisa diajukan Jaksa. Namun di dalam KUHAP dijelaskan bahwa saksi ahli bisa juga dihadirkan pada waktu proses penyelidikan sebagai bentuk laporan sebelum kasus kejahatan tindak pidana diproses di pengadilan.

Isi dari rekaman video CCTV perlu untuk diuji keakuratan serta kevaliditannya guna menguatkan keyakinan hakim sebelum memutuskan perkara. Hal-hal yang berada dalam isi rekaman CCTV hanya bisa dibaca atau dianalisis oleh orang yang ahli IT forensik. Saksi ahli akan memberikan laporan yang terkait dengan isi rekaman video CCTV.

Keterangan yang diberikan oleh saksi ahli di depan majlis hakim yang dikuatkan dengan sumpah bisa dengan memberikan laporan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Keterangan dari saksi ahli bersifat netral. Artinya laporan dari saksi ahli sebatas pada apa yang ada di dalam isi rekaman video CCTV. Khususnya hal-hal yang berkaitan dengan kejelasan dan keaslian dari rekaman CCTV tersebut.

Kekuatan rekaman video CCTV yang terkait dengan keterangan saksi bergantung dari keyakinan hakim. Jika hakim bisa menerima laporan dari saksi ahli, maka hal itu akan menguatkan keyakinan hakim untuk

menetapkan hukuman bagi terdakwa. Namun apabila hakim tidak bisa menerima laporan dari saksi ahli, maka tidak akan menguatkan keyakinan hakim untuk menetapkan hukuman bagi terdakwa. Alat bukti keterangan ahli bersifat bebas. Artinya hakim bisa menerima maupun menolaknya sesuai dengan keyakinannya. Tentunya jika hakim menolaknya dengan suatu alasan yang logis. Hakim bisa menerima tentunya juga dengan suatu alasan yang logis pula.

Keterangan-keterangan dari saksi dan terdakwa yang menyangkut kasus kejahatan tindak pidana dengan bukti CCTV akan menjadi penilaian hakim tersendiri. Penilaian hakim yang secara cermat dan teliti akan menyimpulkan benar salahnya terdakwa sebelum memutuskan perkara. Ditambah lagi dengan laporan dari keterangan ahli yang telah menganalisis keakuratan dan validitas rekaman video CCTV akan memberikan pengaruh kepada hakim. Kekuatan keyakinan hakim akan bertambah jika laporan dari saksi ahli sesuai dengan keterangan-keterangan dari saksi dan terdakwa.

Semua proses pembuktian di dalam persidangan dilakukan semata-mata hanya untuk mengungkap sebuah kebenaran materiil serta untuk mencari keadilan hukum. Sehingga hak-hak dan martabat orang lain akan terjaga dan terlindungi.

2. Kedudukan dan kekuatan alat bukti rekaman video CCTV menurut hukum Islam

Ibnu Qayyim menyatakan bahwa yang disebut alat bukti adalah setiap alasan yang dapat memperkuat dakwaan atau gugatan, sedangkan yang disebut *bayyinah* adalah apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran akan suatu hal. Berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim tersebut, dapat diambil pengertian bahwa segala sesuatu baik berupa benda ataupun non benda pada dasarnya dapat dijadikan sebagai alat bukti. Segala sesuatu tersebut mempunyai kekuatan dalam memberikan tanda-tanda untuk mengungkapkan kebenaran.

Sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju, dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, maka hasil perkembangan teknologi seperti rekaman video CCTV tidak tertutup kemungkinan untuk dijadikan sebagai alat bukti. Jika alat bukti elektronik tersebut terdapat faktor penguat untuk dijadikan alat pembuktian. Rekaman video CCTV dalam hukum Islam dapat di golongankan dengan alat bukti *Qarinah*, atau rekaman video CCTV lebih jelas untuk dianggap suatu jalan yang menuju pada *Qar'inah*. Karena rekaman video CCTV mengandung tanda-tanda atau keterangan-keterangan yang dapat digunakan untuk menguatkan proses pembuktian.

وَشَهِدَ شَهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ فَمِصُّهُ قَدْ مِّنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

Hal tersebut sama halnya jika rekaman video CCTV menjadi sebuah bukti dalam kasus pidana. Maka hakim terlebih dahulu akan memeriksa, mencermati, meneliti dan menganalisis isi yang ada dalam rekaman video CCTV. Kemudian hasil dari pemeriksaan dari hakim tersebut akan disimpulkan dan akan menjadi dalil untuk menguatkan keyakinan hakim atas benar tidaknya pelaku tindak kejahatan.

Jadi isi peristiwa yang ada di dalam rekaman video CCTV dijadikan sebuah tanda-tanda atau sebagai petunjuk untuk mencari kebenaran. Dari petunjuk tersebut maka bisa dikatakan rekaman video CCTV kedudukannya

352

Hakim di dalam persidangan tentunya secara cermat akan memeriksa alat bukti *Qarīnah* yang ada sebelum mengambil keputusan hukum. Alat bukti *Qarīnah* ini bisa disebut dengan *Qarīnah Qaḍā'iyyah*, karena hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara. Dalam upaya pembuktian suatu perkara tidak pidana, hakim dengan teliti melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti yang tampak secara lahir. Rekaman video CCTV memang merupakan salah satu bukti yang secara lahiriyah dapat dipakai sebagai alat pembuktian, bila hal itu dipandang hakim dapat membantu proses pembuktian. Alat-alat bukti yang ada dalam proses persidangan di pengadilan berguna bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan hukum. Sehingga mampu untuk mendorong terwujudnya suatu keadilan serta untuk kemaslahatan umat manusia. Sedangkan rekaman video CCTV dalam hukum Islam kekuatan pembuktiannya bergantung dari penilaian hakim yang memeriksa perkara.

Tugas dan kewajiban hakim adalah harus memberikan putusan yang adil bagi pihak-pihak yang berperkara, lepas dari benar dan tidaknya atau adil dan tidaknya keputusan hakim yang telah melalui proses pemeriksaan yang cermat berdasarkan alat-alat bukti rekaman video CCTV adalah sah. Hakim telah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuannya dan tentunya dimaklumi jika sebagai manusia tentu tidak lepas dari kesalahan-kesalahan, sebab secara hakiki kebenaran mutlak hanya milik Allah swt.

dan kekuatan alat bukti hasil rekaman video CCTV dalam proses pembuktian menurut Hukum Islam akan menjadi sebuah alat bukti *Qarīnah*. Isi dari rekaman video CCTV memberikan banyak keterangan berupa tanda-tanda maupun petunjuk dari suatu peristiwa untuk dicari jalan kebenarannya. Hakim akan melihat tanda-tanda atau petunjuk yang terdapat dari rekaman video CCTV. Kesimpulan dari hakim setelah memeriksa perkara disebut dengan *Qorīnah Qaḍāīyah*. Kekuatan alat bukti rekaman video CCTV dalam kaitannya dengan alat bukti *Qarīnah* berguna untuk menguatkan keyakinan hakim.

B. Saran

1. Seiring dengan kecanggihan teknologi kamera video CCTV, maka suatu area atau lingkungan yang sekiranya diperlukan pengawasan ekstra lebih baik menggunakan kamera CCTV. Hal ini penting karena isi dari rekaman video CCTV dapat digunakan sebagai bukti yang menguatkan di dalam proses persidangan.
2. Hasil rekaman video CCTV merupakan suatu bukti yang efektif untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan. Khususnya kepada para praktisi hukum atau legislator untuk merumuskan KUHAP yang baru dengan memasukkan rekaman video CCTV sebagai alat bukti yang sah, sehingga bisa menutupi celah hukum yang ada sekarang ini.

Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1988

Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektrik*, Yogyakarta, Pustaka Timur, 2010.

G. Widiaratana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT Citra
Aditya Bakti, 2005

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*,
Bandung, Mandar Maju, 2003

Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Semarang, PT
Pustaka Putra, 1997

H. M. A Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang, UMM
Pres, 2007

Husni Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*,
Jakarta, Sinar Grafika, 1992

<http://binksblogger.blogspot.com/2009/03/konsep-teknologi-cctv.html>

[http:// en.wikipedia.org/wiki/Computer Forensics](http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Forensics)

http://nasional.vivanews.com/news/read/58153rekaman_cctv_bakal_dijadika
n bukti di sidang

<http://tongkata-kata.blogspot.com/2010/06/it-forensik.html>

<http://www.rileks.com/entertainment/ragam/omg/1803-terekam-cctv.html>

IKAHI, *Ikatan Hakim Indonesia Varia Peradilan*, Jakarta, IKAHI, 2007

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,
Jakarta, Sinar Grafika, 2000

Martin Gill Angela and Spriggs, *Assessing the Impact of CCTV*, London, 50
Queen Anne's Gate, 2005

Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta , Ghalia Indonesia, 1985

Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1993

Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga, 1984

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bogor, POLITEIA, 1997

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Rajawali Press, 1991

Robert Tampubolon, *Risk and System Auditing*, Jakarta, Elex Media
Komputindo, 2008

Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Malang, UMM Press, 2005

Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1997

